

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asmara, H. M. Galang, *et al.*. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1983). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Garner, Bryan A. (ed.). (2000). *Black's Law Dictionary 7th Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Hadjon, Philipus M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Manullang, M. (1995). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Otto, Jan Michiel. (2011). *Kepastian Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panjaitan, Hulman. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Pratiwi, Cekli Setya, *et al.*. (2016). *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Jakarta: LeIP.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, P. Sondang. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarno. (1986). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafar, Irfan, et al.. (2026). *Pengantar Hukum Administrasi: Konsep, Asas, dan Praktik Pemerintahan*. Padang: Gita Lentera.
- Utrecht, E. (2013). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Terjemahan Moh. Saleh Djindang). Jakarta: Ichtiar Baru.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5070).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5093).
- Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 399)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115)

3. **Jurnal**

Firdaus, M. Bintang. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. 3(1).

Fauzani, Ivan. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Inovatif*. VII(II).

Gandara, Moh. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. *Khazanah Hukum*. 2(3).

Herwantono dan Rizky B. K. (2024). Kajian Revisi PM 57 Tahun 2015 dan PM 93 Tahun 2014 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. *Jurnal*

- Tropika Bahari*. 2(1). Diakses dari <https://jurnal.poltekpelsulut.ac.id/index.php/tropikabahari>
- Hrp, Faisal Sadat. (2026). Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Nilai-Nilai Syariah. *Battuta: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Lingga Abi R. (2024). Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. 1(4).
- Lukijanto, et al. (2019). Digitalisasi Sistem Pelayanan Pandu Kapal Menuju Integrated Port Network. *SENSISTEK*. 2(1).
- Pantjadjatmika, Harmuzan, dan Mardiana. (2024). *The Role of Ship Guidance in Reducing Accident Risks in Tanjung Perak's Mandatory Waters*. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*. 4(4).
- Pramesti, Enggar, et al. (2024). Upaya Peningkatan Keselamatan Pelayaran dalam Kegiatan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Marunda. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 9(10).
- Rista, Rikiatun dan Gatot Budiarto. (2020). Implementasi Kebijakan Pemanduan Kapal di PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Palembang. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*. 1(2).
- Setiadi, Wicipto. (2009). Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 6(4).
- Sihotang, Voni Helen, et al. (2025). Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian yang Timbul dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal (Studi Kasus Putusan No. 295 K/PDT/2024). *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 15(5).
- Syaifullah, Firman, Kuncowati, dan Supangat. (2025). Analisis Penyebab Keterlambatan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal dalam Sistem Digital Operasi Layanan Kapal Terpadu di PT Pelindo (Persero) Cabang Banjarmasin. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*. 16(1).
- Syahputera Walla, Ghufuran, et al. (2021). Kajian terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. 1(9).
- Watulingas, Rudy R. (2020). Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*. VIII(3).

4. Tugas Akhir dan Karya Ilmiah

- Armawayati. (2012). *Revitalisasi Fungsi Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa (Studi di Inspektorat Kota Salatiga)* (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Asroriyah, Toifatul. (2025). *Prosedur Permohonan Pelayanan Jasa Pemanduan Kapal di Divisi Perencanaan dan Pengendalian Kapal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Timur* (Laporan). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhanan Barunawati Surabaya.
- Falah, R. G.. (2015). *Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- Fitri, R. R., dan Eka N. A. M. Sihombing. (2019). *Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iryantin, Al Fiani Nenden. (2015). *Implementasi Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2011 dalam Penanganan Masalah Kesemrawutan di Kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Muhammad. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pelalawan* (Tesis).
- Ramadhania, R. A. Regita. (2019). *Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara dalam Kewenangan Atribusi Berdasarkan Asas Legalitas* (Karya Ilmiah). Universitas Sriwijaya.
- Wijaya, Rahmat. (2020). *Analisis Sistem Operasional Pelayanan Pemanduan terhadap Keselamatan Kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin* (Skripsi). Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

5. Artikel Online

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. (2022). *Membumikan Pancasila di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/membumikan-pancasila-di-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil65fa4881b03b3/detail.html>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2019). *AIS Wajib Dipasang di Kapal yang Berlayar di Perairan Indonesia*. Diakses dari <https://hubla.dephub.go.id>
- InfoPublik. (2022). *Aplikasi Sipandu, Layanan Pemanduan Kapal Berbasis Digital*. Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/660985>

- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka. (2022). Tingkatkan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal, Kemenhub Luncurkan Aplikasi Sipandu. Diakses dari <https://hubla.dephub.go.id>
- Koran Jakarta. (2022). Tingkatkan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal, Kemenhub Luncurkan Aplikasi Sipandu. Diakses dari <https://koran-jakarta.com>
- Liputan6. (2022). Lewat Aplikasi, Kemenhub Digitalisasi Layanan Kepanduan di Pelabuhan. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5048864>
- Pelindo. (2023). Pandu Tunda di Muara Muntai Sesuai Keputusan Pemerintah. Diakses dari <https://kaltim.antaranews.com/berita/239725/pelindo-pandu-tunda-di-muara-muntai-sesuai-keputusan-pemerintah>

